

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI DIY (2008-2022)

Yudha Rizki Romadhona
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/ kota , dan penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah pengangguran di daerah istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Jumlah Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2022 yang sudah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan juga Badan Koordinator Penanaman Modal. Menggunakan data sampel dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2022. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Kemudian dalam variable upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. Dan untuk penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada jumlah pengangguran.

Kata kunci: Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Penanaman Modal Dalam Negeri

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of economic growth, district/city minimum wages, and domestic investment on the number of unemployed in the special region of Yogyakarta. This research uses secondary data, namely data on Economic Growth, Regency Minimum Wage, realization of Domestic Investment, and Number of Unemployed People in the Special Region of Yogyakarta for 2008-2022 which have been published by the Central Statistics Agency and also the Investment Coordinating Board. Using sample data from five districts/cities in the Yogyakarta Special Region for 2008-2022. The method used is panel data regression analysis. This research shows that the economic growth variable has a negative and significant influence on the number of unemployed. Then the minimum wage variable has a positive and significant influence on the number of unemployed. And domestic investment has a negative and significant influence on the number of unemployed.

Key words: *Unemployment, Economic growth, Regency Minimum Wage, Domestic Investment*

PENDAHULUAN

Pengangguran menjadi masalah yang cukup serius dan juga kompleks. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku (Wardiansyah, Yulmardi, & Bahri, 2016). Pengangguran menjadi masalah yang cukup serius dan juga kompleks. Tujuan utama pembangunan ekonomi diantaranya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi untuk

menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat (Sukirno, 2008). Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya (Pitartono & Hayati, 2012). Krusialnya penanganan pengangguran menjadikan masalah ini masuk dalam misi pembangunan nasional tahun 2015-2022 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Permasalahan kemiskinan di DIY merupakan persoalan yang unik, kompleks dan memerlukan solusi yang terpadu. Kompleksitas yang tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan oleh banyaknya elemen yang terkait. Penanggulangan kemiskinan menyangkut lintas sektor, lintas wilayah, dan adanya keterlibatan berbagai-bagai pihak. Studi tentang pengangguran ini menjadi menarik untuk dilakukan karena kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia belum menyelesaikan masalah pengangguran, termasuk juga dengan provinsi DIY. Bahkan dalam negara yang maju sekalipun selalu ada pencari kerja yang tidak akan terserap oleh kebutuhan tenaga kerja yang ada.

TINJAUAN TEORI

Teori Pengangguran

Keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur (Sukirno, 2016). Pengangguran menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengurangi pengangguran secara signifikan. Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibagi dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut (Sukirno, 2016):

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian dan jasa. Di banyak negara berkembang jumlah pekerja dalam suatu ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan.

Pengangguran yang ditimbulkan akibat dari faktor alam.

4. Setengah Menganggur

Di negara berkembang migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan baik. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula setengah menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan 17 jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Pekerja di sini hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, pekerja-pekerja ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau underemployment.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur pencapaian dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu waktu ke waktu yang lainnya. Kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dalam kuantitas dan kualitas outputnya. (Sukirno & Sadono, 2011). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010). Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang harus berbeda dari wujud perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis. Menurut Bappenas wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam kaitan itu, Pemerintah perlu bersikap tidak memihak serta menjaga jarak dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi perusahaan. Ketujuh, pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Upah Minimum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah upah yang wajar. Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan (Pasal 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999) :Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK), Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; Kondisi pasar kerja, dan Tingkat perkembangan perekonomian dan juga pendapatan per kapita.

Investasi

Dalam teori pengangguran struktural Mankiew (2007) menyebutkan bahwa dalam suatu wilayah ada pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi dan kemudian dijelaskan dalam kurva permintaan tenaga kerja. Dalam teori itu menyebutkan upah minimum yang naik akan mengurangu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan mengurangi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Tidak bertemunya antara pencari kerja dengan penyedia lapangan pekerjaan ini terjadi karena adanya penurunan kemampuan perusahaan untuk membayar beban upah karena adanya kenaikan upah. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-

penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2006). Investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah produktifitas pada teori ini. Jenis dan karakteristik (Noor, 2007) Investasi Bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko dan jenis usaha lainnya. Pada umumnya, dalam pembicaraan sehari-hari jenis investasi ini disebut juga investasi pada aset riil, atau investasi yang jelas wujudnya dan mudah dilihat. Tambahan lagi investasi langsung ini menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi masyarakat luas. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak ke belakang, berupa input usaha, maupun ke depan, dalam bentuk output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Contoh dari investasi tidak langsung ini, adalah: deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham dan obligasi, CP (Commercial Paper), reksadana dan sebagainya. Investasi pada aset keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Manfaat masa depan dari investasi ini lebih dikenal dengan balas jasa investasi, atau untuk menyederhanakannya disebut dengan istilah bunga. Berbeda dengan teori klasik pada teori Harrod-Domar menyebutkan bahwa penanaman modal merupakan faktor yang sangat penting untuk menambah atau menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Modal dipandang sebagai kunci dari sebuah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh suatu pihak penanam modal kepada pengusaha yang pada akhirnya akan membuat perusahaan dapat memperlebar usahanya. Kemudian daripada itu akan membuka peluang kesempatan kerja yang juga menyerap tenaga kerja dan hal yang paling krusial adalah dapat mengurangi jumlah pengangguran di wilayah tersebut. Begitulah inti utama dari teori Harrod-Domar yang menyebut mengapa investasi sangatlah penting.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Dimana data yang diperoleh berupa angka yang kemudian dianalisis lebih lanjut dalam sebuah analisis data. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan model regresi berganda yang variabel terikatnya (*dependent variable*). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen sebagai pengukuran yaitu Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan, Upah Minimum Kabupaten dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan satu variabel dependen yaitu Jumlah Pengangguran. Menggunakan aplikasi terapan Eviews-10 dan menggunakan data sekunder. Jenis dan Sumber daya yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga Badan Koordinator Penanaman Modal. Data sekunder yang digunakan di penelitian ini adalah data panel dari tahun 2008-2022. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan penanaman modal dalam negeri apakah memiliki hubungan yang terkait satu sama lain dengan variabel dependen yaitu jumlah pengangguran. Dengan [elitian yang menggunakan regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini regresi data panel memiliki tiga pendekatan model regresi yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Dalam penentuan antara tiga model

tersebut harus dilakukan pemilihan model dengan cara uji hausman dan juga uji chow. Berdasarkan hasil pemilihan model yang sudah dilakukan memakai uji Chow dan uji Hausman, maka model yang terbaik adalah Random Effect Model. Berikut adalah estimasi model Random Effect Model.

Tabel 1. Uji Chow dan Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	Statistik	d.f	Prob
Cross-section F	68.088292	(4,67)	0,0000
Cross-section Chi-square	121.676155	4	0,0000

Sumber: Eviews 10, diolah

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.270765	3	0.3517

Sumber: Eviews 10, diolah

Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang sudah dilakukan dengan uji *Chow* dan uji *Hausman*, maka model yang terbaik yang digunakan dalam model adalah *Random Effect Model*. Berikut adalah estimasi model *Random Effect Model*.

Tabel 2. *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistik	Prob.
C	13.16323	0.976886	13.47468	0.0000
PE	-8.586949	1.166331	-7.362363	0.0000
LOG(UMK)	0.134037	0.062904	2.130834	0.0366
LOG(PMDN)	-0.187756	0.033492	-5.606065	0.0000

Sumber: Eviews 10, diolah

Dari tabel hasil uji t-statistic yang ditunjukkan oleh tabel di atas, maka dapat diperoleh $df=(n-k)$, $df=(75-4) = 71$ dimana nilai t-tabel adalah 1,66

- Variabel PE (X1) atau Pertumbuhan Ekonomi memiliki besaran nilai t- statistik sebesar $7.362363 > t$ -tabel yaitu 1,66 dengan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar $0.000 < 0,05$ maka hasil data dapat dilihat bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan juga signifikan terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Variabel UMK (X2) atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota memiliki besaran nilai t-statistik sebesar $2.130834 > t$ -tabel yaitu 1,66 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0366 < 0,05$ maka hasil data dapat dilihat bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/ Kota memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Variabel PMDN (X3) atau Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki besaran nilai t-statistik sebesar $5.606065 > t$ -tabel yaitu 1,66 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$ maka hasil data dapat dilihat bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan juga penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara negatif dan juga signifikan terhadap jumlah pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2022.
- b. Upah minimum kabupaten/ kota berpengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap jumlah pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2022.
- c. Penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara negatif dan juga signifikan terhadap jumlah pengangguran di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2022.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan juga penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya sebagai:

1. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu kegiatan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur situasi ekonomi di setiap periode di wilayah tertentu. Maka diharapkan pemerintah dan juga pemegang kebijakan yang lain harus menciptakan regulasi yang baik agar banyak pemilik modal dan juga perusahaan mampu memperbesar kegiatan ekonomi yang ada dan tentu hal itu akan mendorong pertumbuhan PDRB di wilayah DIY.
2. Upah minimum menjadi hal yang sangat sensitif bagi pemilik modal dan juga tenaga kerja. Peneliti menyarankan pemerintah agar selalu memihak kepada keadilan tanpa adanya suatu kepentingan tertentu. Hukuman yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum secara benar juga perlu dilakukan agar tidak adanya penyelewengan dari oknum penyedia lapangan kerja. Maka dari itu dibutuhkan aturan yang tegas dan juga adil untuk memfasilitasi serikat buruh dan juga pemilik lapangan kerja, dan pemerintah harus berperan sebagai mediator yang baik berada ditengah-tengahnya sebagai pihak yang memfasilitasi dua kepentingan yang cukup berbeda itu.
3. Regulasi yang baik akan mendatangkan iklim ekonomi yang baik juga bagi suatu wilayah. Maka pemerintah harus selalu memiliki regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain yang menguntungkan pihak tertentu. Dengan adanya regulasi yang jelas tentu saja pihak yang akan menanamkan modal akan lebih nyaman untuk menanamkan modalnya atau bahkan membuka tempat usaha di tempat tersebut. Aturan yang cenderung ramping dan tidak berbelit-belit akan sangat dibutuhkan agar proses penanaman modal berjalan dengan baik, namun pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang akan terjadi pada aktivitas ekonomi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Basri, F. (2010). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Biro Humas Kemnaker. (2021, November 14). *Kemnaker Bahas Proses Penetapan Upah Minimum Tahun 2022*. Retrieved from [kemnaker.go.id:https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-bahas-proses-penetapan-upah-minimum-tahun-2022](https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-bahas-proses-penetapan-upah-minimum-tahun-2022)
- BPS. (2019, 05 11). *Keadaan Ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta Agustus 2019*. Retrieved from

yogyakarta.bps.go.id:

<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/963/keadaan-ketenagakerjaan-di-yogyakarta-agustus-2019.html>

BPS. (2024, Mei 6). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan.*

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>

Indonesia. (1968). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2005 tentang pengupahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Menteri Tenaga Kerja. (1999). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per-01/Men/1999*. Jakarta.

Pitartono, R., & Hayati, B. (2012). Analisis Tingkat Pengangguran di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economic*, 1.

Rosa, Del, Y., Agus, Imran, & Abdilla. (2019). Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter dan Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas Volume 21No 2 Hal 283-293*, 283-293.

Saptenno, F., & Maatoke, C. K. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi. *Cita Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi*.

Sholikhati, M. E., & Wardono. (2020). Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA.

Sukirno, S. (2016). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pemerintah Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden No. 78 tentang Pengupahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sadono, & Sukirno. (2011). *Makroekonomi Modern*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Wardiansyah, M., Yulmardi, & Bahri, Z. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 5. No.1*, 13.